

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang dalam konteks politik lingkungan hidup. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana politik lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan atau justru cenderung mendukung kepentingan ekonomi perusahaan. Perspektif teori yang digunakan yaitu teori politik lingkungan, teori kepemimpinan, konsep kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit membawa dampak ganda: di satu sisi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, serta konflik sosial. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat minim. Temuan ini mengindikasikan bahwa politik lingkungan belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.

Kata kunci: Aceh Tamiang, kebijakan publik, kelapa sawit, lingkungan, politik

ABSTRACT

This study examines the role of local government in managing palm oil plantations in Aceh Tamiang Regency within the context of environmental politics. The main questions addressed in this study are how environmental politics influence government decision-making in the management of palm oil plantations, and whether the policies adopted by the local government prioritize environmental sustainability or instead tend to support the economic interests of companies. The theoretical perspectives applied include environmental political theory, leadership theory, and the concepts of government policy and local governance. The research employs a qualitative method, with data collected through in-depth interviews, documentation, and field observations. The findings indicate that the presence of palm oil plantations has a dual impact: on the one hand, they provide economic benefits to local communities, but on the other hand, they contribute to environmental degradation such as deforestation, pollution, and social conflicts. The Aceh Tamiang Regency Government has issued Regent Regulation No. 42 of 2024 concerning the Regional Action Plan for Sustainable Palm Oil as a form of commitment to sustainable management. However, the implementation of this regulation has not been optimal due to the minimal involvement of the community in decision-making processes. These findings suggest that environmental politics have not yet become the primary foundation in the formulation of palm oil plantation management policies in the region.

Keywords: Aceh Tamiang, environmental, local government, palm oil, policy